Kerusuhan Mei 1998

Kerusuhan Mei 1998,[1] yang juga dikenal secara umum sebagai **Tragedi 1998** atau hanya **Peristiwa 98,** adalah serangkaian kerusuhan dan pergolakan sipil di Indonesia, yang sebagian besar menyasar penduduk etnis Tionghoa. Peristiwa ini terutama terjadi di kota Jakarta, Medan, Surakarta, Palembang,[2] dan Surabaya[3] dengan insiden-insiden berskala lebih kecil di berbagai wilayah lain di Indonesia.

Di bawah pemerintahan Soeharto yang didukung Barat, terdapat diskriminasi yang meluas dan sistemik terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Kerusuhan tersebut dipicu oleh korupsi, masalah ekonomi, termasuk kekurangan pangan dan pengangguran massal. Kerusuhan ini akhirnya berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto dan jatuhnya pemerintahan Orde Baru, yang telah berkuasa selama 32 tahun dan didukung oleh kekuatan Barat seperti Amerika Serikat. Target utama dari kerusuhan tersebut adalah etnis Tionghoa Indonesia, tetapi sebagian besar korban jiwa disebabkan oleh kebakaran besar dan terjadi di antara para penjarah.[4][5][6][7][8][9]

Diperkirakan lebih dari seribu orang tewas dalam kerusuhan tersebut.[10][11] Sedikitnya 168 kasus pemerkosaan dilaporkan, dan kerusakan material senilai lebih dari Rp3,1 triliun (US$260 juta). Hingga tahun 2010, proses hukum atas kerusuhan tersebut terhambat dan tidak diselesaikan.[12]

Kerusuhan Mei 1998

Bagian dari Kejatuhan Soeharto, Krisis finansial Asia 1997 dan Sentimen anti-Tionghoa di Indonesia



Para perusuh membakar perabot kantor di jalanan Jakarta pada 14 Mei 1998

Tanggal	4–8 dan 12–15 Mei 1998
Lokasi	Kerusuhan besar terjadi di Medan, Jakarta, Surabaya, Palembang dan Surakarta dengan sejumlah insiden terpisah di tempat lain
Sebab	▪ Diskriminasi jangka panjang terhadap warga Tionghoa-Indonesia ▪ Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru ▪ Dugaan kecurangan suara dalam pemilu legislatif 1997 ▪ Keruntuhan ekonomi sebagai akibat dari krisis keuangan Asia 1997 ▪ Otoritarianisme ▪ Tragedi Trisakti
Metode	Kerusuhan, pembangkangan sipil, penjarahan, pembakaran disengaja, pemerkosaan, vandalisme
Hasil	▪ Pengunduran diri Presiden Soeharto dan pembentukan

Kerusuhan

Pada kerusuhan ini banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amukan massa—terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa.[13] Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, seorang aktivis relawan kemanusiaan yang bergerak di bawah Romo

Sandyawan, bernama Ita Martadinata Haryono, yang masih seorang siswi SMU berusia 18 tahun, juga diperkosa, disiksa, dan dibunuh karena aktivitasnya. Ini menjadi suatu indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam kerusuhan ini digerakkan secara sistematis, tak hanya sporadis.[14]

Amukan massa ini membuat para pemilik toko di kedua kota tersebut ketakutan dan menulisi muka toko mereka dengan tulisan "Milik pribumi" atau "Pro-reformasi" karena penyerang hanya fokus ke orang-orang Tionghoa. Beberapa dari mereka tidak ketahuan, tetapi ada juga yang ketahuan bukan milik pribumi.

Sampai bertahun-tahun berikutnya Pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama yang dianggap kunci dari peristiwa kerusuhan Mei 1998. Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa bukti-bukti konkret tidak dapat ditemukan atas kasus-kasus pemerkosaan tersebut, tetapi pernyataan ini dibantah oleh banyak pihak.[14]

Sebab dan alasan kerusuhan ini masih banyak diliputi ketidakjelasan dan kontroversi sampai hari ini. Namun umumnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan setuju bahwa peristiwa ini merupakan sebuah lembaran hitam sejarah Indonesia, sementara beberapa pihak, terutama pihak Tionghoa, berpendapat ini merupakan tindakan pembasmian (genosida) terhadap orang Tionghoa.

Kabinet Reformasi Pembangunan baru di bawah B.J. Habibie

- 2.244 orang tewas, 168 kasus pemerkosaan, lebih dari 4.000 toko dan pasar hancur, ribuan rumah dan kendaraan dibakar
- Kemerdekaan Timor Leste
- Awal Era Reformasi

Pihak terlibat		
Pemerintah Indonesia Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut Korps Marinir Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia Korps Brigade Mobil Badan Intelijen Negara	Warga sipil asli Indonesia yang terdiri dari pendukung Megawati Soekarnoputri, pengunjuk rasa anti-pemerintah, dan pengunjuk rasa Arab Indonesia	Warga sipil Tionghoa Indonesia termasuk beberapa pendukung anti-Megawati dan anti-Soeharto

Korban

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) jumlah korban jiwa akibat kerusuhan 1998 mencapai 1.308 jiwa. TGPF merinci jumlah korban, yang terdiri atas korban tewas, korban luka, dan korban kekerasan seksual.[15]



Peta Indonesia yang menunjukkan lokasi kerusuhan Mei 1998

TGPF menemukan variasi data jumlah korban meninggal dan luka-luka. Pertama, data dari tim relawan yang diperoleh dari berbagai sumber menyatakan terdapat 1.308 korban dalam kerusuhan ini. Korban meninggal sebanyak 1.217 orang dengan rincian meninggal karena senjata sebanyak 1.190 orang dan dibakar sebanyak 564 orang. Sementara itu, korban yang luka-luka sebanyak 91 orang.[16]



Bentrokan antara mahasiswa Universitas Trisakti dan aparat kepolisian pada Mei 1998



Mahasiswa berdemonstrasi menolak Sidang Istimewa MPR tahun 1998

Mereka yang meninggal karena senjata termasuk empat korban Tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998. Pembakaran Plaza Sentral Klender dianggap sebagai peristiwa yang paling banyak memakan korban jiwa dalam kerusuhan tersebut, setidaknya 288–488 orang tewas dan terbakar secara hidup-hidup.[17]

Pengusutan dan penyelidikan

Tidak lama setelah kejadian berakhir dibentuklah Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelidiki masalah ini. TGPF ini mengeluarkan sebuah laporan yang dikenal dengan "Laporan TGPF" [14]

Mengenai pelaku provokasi, pembakaran, penganiayaan, dan pelecehan seksual, TGPF menemukan bahwa terdapat sejumlah oknum yang berdasar penampilannya diduga berlatar belakang militer.[18] Sebagian pihak berspekulasi bahwa Pangab saat itu (Wiranto) dan Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin melakukan pembiaran atau bahkan aktif terlibat dalam provokasi kerusuhan ini.[19][20][21]

Pada 2004 Komnas HAM mempertanyakan kasus ini kepada Kejaksaan Agung namun sampai 1 Maret 2004 belum menerima tanggapan dari Kejaksaan Agung.[22]

Penuntutan Amendemen KUHP

Pada bulan Mei 2010, Andy Yentriyani, Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), meminta supaya dilakukan amendemen terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut Andy, Kitab UU Hukum Pidana hanya mengatur tindakan perkosaan berupa penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan. Namun pada kasus Mei 1998, bentuk kekerasan seksual yang terjadi sangat beragam. Sebanyak 85 korban saat itu (data Tim Pencari Fakta Tragedi Mei 1998) mengalami pemerkosaan anal, oral, dan/atau disiksa alat kelaminnya dengan benda tajam. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut belum diatur dalam pasal perkosaan Kitab UU Hukum Pidana.[23]

Reaksi

Pemerintah

Kekerasan di Medan menarik perhatian para pejabat keamanan nasional. Jenderal Wiranto, Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab, atau Panglima ABRI), mengunjungi daerah-daerah yang terkena dampak pada tanggal 6 Mei dan mengerahkan pasukannya untuk membantu memulihkan

ketenangan di kota tersebut. Dua hari kemudian, Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari Kostrad (Cadangan Strategis Angkatan Darat) mengerahkan salah satu unitnya "untuk mendukung pasukan lokal dan meyakinkan masyarakat bahwa yang lain siap untuk pergi ke daerah-daerah yang bermasalah jika diperlukan". Namun, tidak ada upaya yang mampu menahan kekerasan karena kerusuhan terus berlanjut di Medan selama tiga hari setelah kunjungan Wiranto, yang membuat masyarakat percaya bahwa hanya sedikit perintah yang dilaksanakan oleh unit-unit yang dikerahkan.[24] Ketertiban akhirnya dipulihkan ketika komandan militer daerah Yuzaini meminta bantuan para pemimpin masyarakat dan organisasi pemuda untuk mengatur patroli lokal (siskamling) dengan pasukan keamanan.[25] Kelambanan upaya pengamanan terus berlanjut seiring meningkatnya kekerasan di Jakarta, dan pimpinan militer yang bertanggung jawab atas keamanan di ibu kota— Wiranto, Prabowo, dan Susilo Bambang Yudhoyono—absen. Respons militer dan polisi di ibu kota tidak konsisten. Tentara di wilayah utara Mangga Besar diduga hanya berdiam diri dan membiarkan penjarah kabur membawa barang curian.[26] Sementara tentara yang ditugaskan di Slipi dilaporkan mencoba dengan sekuat tenaga melindungi rakyat dari penjarah.[27]



B. J. Habibie mengambil sumpah jabatan presiden setelah pengunduran diri Suharto, satu minggu setelah kekerasan tersebut. Ia kemudian menunjuk tim pencari fakta untuk menyelidiki kerusuhan Mei.

Di Surakarta, perwakilan Angkatan Bersenjata Kolonel Sriyanto membantah tuduhan pengabaian oleh militer. Ia mengklaim bahwa pasukan darat terbatas karena beberapa unit sedang dalam perjalanan ke Jakarta sementara beberapa yang tertinggal membantu polisi dalam mengendalikan pengunjuk rasa di Universitas Muhammadiyah. Sebagian besar, militer menggambarkan kekerasan tersebut "dalam bentuk massa yang menjadi gila, bertindak secara tak terkendali dan spontan, yang jumlahnya lebih banyak daripada pasukan keamanan". Susuhunan Pakubuwana XII, raja tradisional Surakarta, mengutuk kekerasan tersebut sebagai perilaku yang "tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya yang dianut wong Solo". Ia juga tampil langka pada tanggal 19 Mei untuk menunjukkan solidaritas para elit dengan para korban kekerasan. Dalam sebuah pertemuan dengan 5.000 mahasiswa di kompleks istananya, ia menjanjikan sejumlah uang simbolis sebesar Rp1.111.111 untuk mendukung seruan mahasiswa untuk reformasi.[28]

Setelah menyadari bahwa Suharto telah kehilangan kendali atas pejabat militer seniornya, ia mengundurkan diri sebagai presiden seminggu setelah kerusuhan pada 21 Mei.[28] Dua bulan kemudian pada 23 Juli, penerusnya B. J. Habibie menunjuk TGPF untuk melakukan investigasi resmi atas kerusuhan Mei. Selama investigasi, tim mengalami kesulitan menemukan saksi yang bersedia memberikan kesaksian tentang kekerasan tersebut, dan tim hanya diberi waktu tiga bulan untuk menyelidiki kerusuhan di enam kota. Data yang dikumpulkan oleh tim terutama berasal dari organisasi non-pemerintah dan Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom PKB) yang disponsori negara, yang telah menyusun banyak laporan polisi tentang insiden tersebut.[29] Laporan lengkap yang berjumlah ratusan halaman itu tidak pernah dibagikan ke publik dan hanya tersedia bagi anggota tim, menteri terkait, dan beberapa peneliti. Media menerima ringkasan setebal 20 halaman dalam bahasa Indonesia dan Inggris, yang kemudian disebarluaskan secara luas di Internet.[29]

Hingga saat ini, pemerintah pusat menyangkal adanya pemerkosaan dan kekerasan seksual selama kerusuhan dengan alasan kekurangan bukti walaupun banyak bukti sudah dikumpulkan baik oleh aktivis HAM lokal maupun internasional.[30]

Publik

Orang Tionghoa-Indonesia di Medan menjadi korban preman lokal yang mengancam komunitas mereka dengan kekerasan. Sebelum kerusuhan, orang Tionghoa biasanya menggunakan metode di luar hukum untuk menjamin perlindungan dan keamanan mereka. Akibatnya, kelompok yang memeras uang dari orang Tionghoa—kadang-kadang agen pemerintah—melihat mereka sebagai "sapi perah". Namun, selama kekerasan, intimidasi sering diikuti oleh penjarahan toko dan bisnis milik orang Tionghoa.[31] Sebagian besar masyarakat percaya bahwa warga negara Indonesia non-Tionghoa itu “aman”, oleh karena itu banyak yang memasang tanda di depan tempat usaha mereka yang bertuliskan “punya Muslim Pribumi”.[32] Merasa dikhianati oleh negara sendiri akibat kerusuhan, banyak Tionghoa Indonesia bermigrasi ke Malaysia, Singapura, Taiwan, Belanda, Australia dan Amerika Serikat serta berbagai lokasi dekat Indonesia. Mereka yang tetap tinggal menginap di hotel milik masyarakat adat atau mempersenjatai diri untuk membentuk kelompok pertahanan masyarakat.[33] Namun, warga masyarakat setempat membedakan insiden ini dari kekerasan anti-Tionghoa sebelumnya karena ancaman terhadap orang Tionghoa merupakan "bagian dari struktur sosial ekonomi dan politik kota". Mereka percaya bahwa kerusuhan tersebut dipicu oleh demonstrasi mahasiswa atau preman yang ingin mendiskreditkan gerakan reformasi.[34]

Kisah-kisah kekerasan seksual dengan para pelaku yang meneriakkan slogan-slogan anti-Tionghoa dan berbagai makian verbal lainnya selama kerusuhan Jakarta mengejutkan masyarakat Indonesia. Karena insiden-insiden tersebut digambarkan sebagai kekerasan yang disponsori negara, kelompok-kelompok nasional dan internasional menjadi lebih vokal dalam menyerukan reformasi dan agar pemerintah mengundurkan diri.[35] Tokoh Muhammadiyah Amien Rais mengecam kerusuhan yang terjadi di Surakarta yang ia nilai lebih destruktif dari Jakarta.[36] Pernyataannya bahwa peristiwa Surakarta didalangi oleh dalang dan bukan massa yang tidak terorganisasi menjadi berita utama nasional.[28] Tidak seperti di Jakarta, warga Tionghoa setempat memandang bahwa Surakarta tidak begitu anti-Tionghoa. Citra ini semakin diperkuat oleh desakan dari orang-orang Tionghoa Indonesia yang berpengaruh bahwa penyebabnya “beragam”. Kebanyakan orang Tionghoa yang melarikan diri saat kekerasan terjadi kembali setelah kekerasan mereda, tidak seperti mereka yang tinggal di Medan dan Jakarta.[37]

Internasional

Saat berita kerusuhan di Indonesia telah mencapai diaspora etnis Tionghoa lainnya, kerusuhan ini langsung dilabel "anti-Tionghoa". Pada 20 Juli, diaspora Tionghoa di California mendirikan "Komite Penyelamatan Hak Asasi Manusia Indonesia" dan mulai mencari bukti penganiayaan yang dilakukan Indonesia terhadap warga Tionghoa. Diaspora Tionghoa di New York dan Washington, D.C. mengelar unjuk rasa dengan puluhan ribu tanda tangan dan demonstrasi untuk mengutuk penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap warga Tionghoa di luar negeri dan

> Sebelumnya, masyarakat Tionghoa lebih peduli dengan masalah komersial dan ekonomi. Etnis Tionghoa di Indonesia telah dihantam oleh kerusuhan selama beberapa dekade terakhir—

untuk menunjukkan solidaritas terhadap penderitaan warga Tionghoa. Salah satu organisasi yang paling menonjol adalah Asosiasi Tionghoa New York yang melawan kekerasan terhadap Tionghoa di Indonesia. Di Hong Kong, lebih dari 40 perwakilan kelompok perempuan dan lebih dari 80 warga Tionghoa Indonesia berbaris menuju Konsulat Jenderal Indonesia di Hong Kong untuk berdemonstrasi dan menyerahkan pernyataan protes kepada konsulat. Aksi serupa dilakukan di Inggris, Selandia Baru, Kanada, Australia, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Utusan pemerintah Kanada bertemu dengan korban pemerkosaan dan menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemerintah Indonesia.

> tetapi mereka selalu menerima hukuman itu dengan pasrah demi mempertahankan kepentingan komersial mereka. Kali ini, terjadi perubahan penting dengan teknologi komunikasi modern yang menjadi kekuatan pemersatu.
>
> — —Felix Soh, *The Straits Times*[38]

Etnis Tionghoa mengorganisasi protes melalui situs web Global Huaren, yang didirikan oleh emigran Tionghoa Malaysia Joe Tan di Selandia Baru. Tan mendirikan situs web tersebut sebagai respons terhadap "ketidakpedulian" di seluruh dunia dan menyebarkan berita tentang kekerasan tersebut kepada para profesional dan kolega. Para anggota kemudian mengoordinasikan demonstrasi di kedutaan besar dan konsulat Indonesia di kota-kota besar di Lingkar Pasifik.[39] Aksi solidaritas yang dilakukan oleh komunitas internasional membawa kesadaran baru tentang identitas etnis dan nasional—Indonesia dan Tionghoa—di antara orang Tionghoa Indonesia "karena selama ini yang satu telah dikorbankan untuk yang lain".[40]

Tiongkok

Sikap Tiongkok yang hati-hati dan pasif banyak dikecam oleh organisasi hak asasi manusia. Pada bulan April 1998, Menteri Luar Negeri Tiongkok Tang Jiaxuan mengunjungi Indonesia[41] dengan janji memberikan bantuan sebesar US$400 juta untuk mengatasi krisis moneter dan mempererat hubungan antarbangsa.[42][43] Ia juga menyatakan bahwa tensi antar etnis di Indonesia adalah urusan dalam negeri dan Tiongkok tidak berhak untuk melakukan intervensi.[44][45][46][47] Zhang Yunling, yang saat itu menjabat sebagai direktur Institut Studi Asia Tenggara di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok, mengatakan bahwa sebelum kerusuhan Mei terjadi, otoritas Beijing hanya berharap kerusuhan tidak akan terjadi.[48] Kerusuhan ini hanya dianggap sebagai urusan internal di pemerintah Tiongkok karena sebagian besar yang terkena dampak adalah warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, pemerintah Tiongkok, yang tidak mengakui kewarganegaraan ganda, mengadopsi kebijakan non-intervensi berdasarkan Lima Prinsip Hidup Berdampingan secara Damai.[49][50][51][52]

Mulai tanggal 13 Mei 1998, kerusuhan besar-besaran dimulai. Selama kerusuhan terjadi, Kementerian Luar Negeri Tiongkok membentuk tim tanggap darurat 24 jam dan merumuskan rencana untuk melindungi dan mengevakuasi warga Tiongkok di luar negeri.[53] Pada tanggal 21 Mei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhu Bangzao menanggapi pertanyaan wartawan dengan mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok telah mengikuti dengan saksama perkembangan situasi di Indonesia dan sangat prihatin dengan nasib warga negara Tiongkok yang terdampar di sana, termasuk warga negara Hong Kong, Macau, dan Taiwan.[41][54]

Beberapa bulan setelah kerusuhan, surat kabar *People's Daily* melaporkan pada 15 Agustus Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia telah menghubungi satu per satu untuk mengonfirmasi keselamatan lebih dari 300 orang Tiongkok yang terdaftar selama kerusuhan untuk memindahkan yang terjebak ke area aman, dan meminta maskapai penerbangan untuk mengoperasikan tiga penerbangan lagi untuk mengevakuasi lebih dari 200 orang. Artikel tersebut juga mengklaim bahwa setelah kerusuhan, Kedutaan Besar China di Indonesia melakukan banyak upaya penjelasan dan upaya perdamaian atas nama pemerintah China kepada masyarakat Tionghoa Indonesia. Dubes RI juga menyambangi kota-kota di pulau terluar yang menjadi tempat berkumpulnya warga Tionghoa untuk menyampaikan rasa belasungkawa, mendengar keluh kesah dan permohonan bantuan mereka, serta menyampaikan rasa simpati dan perhatian pemerintah serta rakyat Tiongkok atas kerusuhan dan musibah yang menimpa warga Tionghoa.[55]

Namun, seorang saksi mata melaporkan bahwa selama kerusuhan, ada tiga Tionghoa Indonesia yang meminta bantuan ke kantor kedutaan besar namun pemerintah Tiongkok menolak untuk memberi bantuan setelah melihat bahwa mereka berstatus Warga Negara Indonesia.[56] Sarjana Indonesia Leo Suryadinata, sarjana Tiongkok Zha Daoxiong, sarjana Selandia Baru Du Jianhua, sarjana Singapura Xu Benqin dan lain-lain telah menunjukkan bahwa selama kerusuhan tersebut, pemerintah Tiongkok tidak mempunyai niat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan kepada para korban, yaitu warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Sebelum kerusuhan anti-Tiongkok pada bulan Mei, banyak warga Tionghoa di luar Indonesia yang mengkritik pemerintah Tiongkok karena melindungi warga Tionghoa Indonesia, tetapi Beijing menolak untuk campur tangan karena hubungan antara Beijing dan Jakarta sudah cukup harmonis saat itu dan Beijing tidak ingin merusak hubungan ini. Diplomat Tiongkok di Amerika Serikat secara pribadi mengatakan tidak mungkin bagi pemerintah Tiongkok untuk melakukan protes atau mengirim kapal ke Indonesia karena sebagian besar warga Tiongkok di Indonesia adalah warga negara Indonesia dan tidak ada alasan yang tepat untuk melakukannya. Sikap Beijing tidak berubah selama periode kerusuhan anti-Tiongkok yang parah pada bulan Mei.[57] Pemerintah Tiongkok memang telah mengambil langkah-langkah untuk mengevakuasi warga negara Tiongkok yang bekerja dan bepergian di Indonesia, dan memberikan perlindungan konsuler bagi pemegang dokumen perjalanan Taiwan dan Makau yang mencari bantuan, tetapi sebaliknya, pemerintah Tiongkok tidak bersedia untuk campur tangan dalam nasib warga negara Tiongkok di Indonesia.[58] Secara formal dan umum, apa yang terjadi di Jakarta bukanlah urusan Beijing dan Tiongkok menyatakan bahwa Tionghoa Indonesia sudah menjadi bagian dari "keluarga besar Indonesia" sehingga mereka tidak memiliki kewajiban untuk melindungi Tionghoa Indonesia.[59] Mendekatnya peringatan unjuk rasa Tiananmen 1989 yang jatuh pada 4 Juni juga menjadi salah satu alasan kenapa pemerintah Tiongkok tidak ingin ikut campur karena khawatir bahwa sentimen nasionalisme Tiongkok akan kembali bangkit dan memberi tekanan kepada Partai Komunis Tiongkok yang saat itu dipimpin oleh Jiang Zemin, terutama karena kerusuhan yang terjadi mengingatkan mereka terhadap pembantaian 4 Juni di Tiongkok.[60]

Selama kerusuhan Indonesia pada bulan Mei, sebagian besar surat kabar dan stasiun televisi China tidak melaporkan insiden tersebut. Pemerintah Beijing lambat dalam memberikan tanggapan, hanya menyebutkan insiden tersebut secara singkat di media milik pemerintah dan tidak menganggapnya sebagai masalah kebijakan luar negeri. Mereka yang mencoba melakukan protes dibungkam, dan liputan berita apa pun segera ditekan.[61] Bahkan setelah kasus pemerkosaan terungkap pada awal Juni, meskipun insiden tersebut mendapat perhatian dari masyarakat internasional dan media dari berbagai negara, respon dari media Tiongkok daratan masih tertinggal.[62] Pada 5 Juli, pemimpin

redaksi surat kabar Malaysia *Sin Chew Daily* Zhang Xiaoqing mengeluarkan editorial yang mengkritik Tiongkok yang menolak memberi bantuan kepada Tionghoa Indonesia hanya karena tidak mau mengikut campuri urusan dalam negeri Indonesia.[63]

Tiongkok akhirnya berhenti membisu setelah dua bulan dan mengubah sikapnya.[64] Pada 6 Juli, pernyataan pertama dari pemerintah Tiongkok keluar dari Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Chen Siqiu dalam sebuah wawancara dari media Indonesia saat meninjau investasi kelapa sawit di Kalimantan Timur.[65] Chen menyampaikan keprihatinan pemerintah Tiongkok atas kerusuhan yang terjadi dan meminta pemerintah Indonesia untuk mengusut tuntas masalah tersebut. Saat yang sama, Chen juga memyampaikan bahwa pemerintah Tiongkok tidak akan protes keras karena keselamatan Tionghoa Indonesia seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia.[66] Kemudian pada 28 Juli, *People's Daily* mengeluarkan editorial pertamanya yang meliputi kerusuhan di Indonesia. Menanggapi pertanyaan wartawan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Tang Guoqiang mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok menyatakan keprihatinan dan kegelisahan yang mendalam mengenai pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa Indonesia dalam kerusuhan bulan Mei, dan telah berulang kali menggunakan jalur diplomatik untuk berharap agar pemerintah Indonesia menyelidiki secara menyeluruh insiden terkait dan mengambil tindakan efektif untuk menghindari insiden serupa yang tidak diinginkan.[55][67] Pada tanggal 3 Agustus, *People's Daily* menerbitkan sebuah komentar yang menyerukan perlindungan keselamatan dan hak hukum warga negara Indonesia Tionghoa dan hukuman berat bagi pelanggar hukum.[68] Pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Agustus, Menteri Luar Negeri Tiongkok Tang Jiaxuan mendesak pemerintah Indonesia untuk mengusut masalah tersebut, melakukan investigasi dan menanganinya secepat mungkin, serta menjamin keselamatan dan hak serta kepentingan sah warga Tiongkok di luar negeri. Saat yang sama pada 17 Agustus, 200 mahasiswa Tiongkok di Beijing mengadakan aksi unjuk rasa di KBRI Beijing tetapi bubar setelah dibujuk dan dihentikan oleh kepolisian dan sekolah Tiongkok.[69][70][71][72][73]

Namun, Tiongkok tetap menjaga hubungan ekonomi dan bilateral yang erat dengan Indonesia.[74] Antara melaporkan pada tanggal 6 Agustus, pemerintah Tiongkok setuju untuk menjual 50.000 ton beras ke Indonesia.[75] Pada tanggal 15 Agustus, Tiongkok memberikan bantuan medis sebesar US$3 juta kepada Indonesia sesuai janjinya, dan terus memberikan pinjaman ekonomi sebesar US$200 juta kepada Indonesia sebagaimana yang dijanjikan pada bulan April.[76] Pada tanggal 26 November, menurut *The Jakarta Post*, delegasi ekonomi dan perdagangan Tiongkok mengunjungi Jakarta sesuai jadwal untuk membahas proyek investasi Tiongkok di Indonesia.[77]

Pada tanggal 17 November, Presiden Tiongkok sekaligus Sekretaris Jenderal Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok Jiang Zemin bertemu dengan Presiden B. J. Habibie di Hotel Shangri-La di Kuala Lumpur, Malaysia, saat menghadiri Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC Keenam. Dalam pertemuan tersebut, Jiang Zemin menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara tetangga yang bersahabat bagi Tiongkok dan pengembangan lebih lanjut hubungan kedua negara merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Tiongkok. Ia menyampaikan apresiasinya atas upaya aktif Habibie dalam mendorong pengembangan hubungan antara Tiongkok dan Indonesia. Pada saat yang sama, ia menyatakan keprihatinannya terhadap situasi warga negara Indonesia Tionghoa dan mengatakan bahwa keselamatan pribadi serta hak dan kepentingan hukum warga negara Indonesia Tionghoa harus dilindungi secara efektif oleh pemerintah Indonesia. Habibie juga mengucapkan terima kasih kepada Tiongkok atas bantuannya yang berharga bagi Indonesia dan mengatakan bahwa

kerusuhan pada bulan Mei merupakan tindakan kriminal yang akan ditangani oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan hukum.[78] Jiang Zemin berkata "Tionghoa Indonesia tidak hanya akan berperan bagi... stabilitas jangka panjang Indonesia, tetapi juga... kelancaran pengembangan hubungan kerja sama yang bersahabat dengan negara-negara tetangga."[79] Ia juga berjanji bahwa Tiongkok tidak akan menggunakan Tionghoa Indonesia untuk mencari keuntungan pol itik dan ekonomi lokal.[80] Setelah itu, liputan terhadap kerusuhan ini memudar di Tiongkok.[81] Tiongkok juga mengklaim mereka juga telah mendesak maskapai penerbangan untuk mengoperasikan tiga penerbangan lagi dari Indonesia, yang mengangkut sekitar 200 warga Tiongkok dari Jakarta.[82]

Kerusuhan ini dikenal di Tiongkok sebagai **Mei Hitam** (黑色的五月), dinamai berdasarkan sebuah dokumenter VCD meliputi kerusuhan tersebut yang diliris oleh China Radio and Television Publishing House pada bulan Oktober.[83] Mulai sekitar tahun 2010, rumor tentang insiden anti-Tiongkok tahun 1998 di Indonesia mulai muncul dalam jumlah besar di Internet Tiongkok. Isi utama laporan tersebut adalah bahwa pemerintah Republik Rakyat Tiongkok saat itu melakukan evakuasi dan penyelamatan paksa terhadap warga Tionghoa Indonesia dengan cara mengirimkan kapal, membagikan paspor kosong, atau mengunjungi setiap rumah tangga. Namun, warga Tionghoa Indonesia yang setia kepada pemerintah Taiwan menolak penyelamatan tersebut. Sebaliknya, mereka melaporkan tindakan pejabat konsuler China tersebut kepada pihak berwenang Indonesia, yang mengakibatkan pembantaian brutal. Contohnya adalah artikel yang diterbitkan oleh Zhou Xiaoping, seorang komentator online Tiongkok yang terkenal, di Party Building Network.[84] Namun, menurut memoar Liu Yonggu, yang saat itu menjabat sebagai penasihat Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia,[85] pada 1998 Tiongkok tidak mengirim kapal untuk menjemput orang-orang seperti yang dikabarkan, tetapi malah mengoordinasikan tiga penerbangan carteran untuk mengevakuasi total 600 orang, termasuk 300 warga Hong Kong dan 100 warga negara Indonesia Tionghoa setempat. Saat itu, pemerintah Tiongkok hanya mengeluarkan 40 sertifikat dan pernyataan perjalanan, yang dapat berfungsi sebagai dokumen identifikasi alih-alih paspor, tetapi penerima manfaat utamanya adalah orang-orang dari Hong Kong dan Taiwan. Bagi warga negara Indonesia Tionghoa yang berhasil tiba di Tiongkok atas usaha sendiri, disediakan lebih dari 10.000 visa kedatangan dan visa belajar. Tidak pernah ada cerita tentang membuang paspor kosong ke tanah dan tidak ada seorang pun yang mengambilnya. Selain itu, kedutaan besar China memiliki sumber daya manusia yang terbatas pada saat itu, dan satu-satunya pasukan bergerak yang digunakan hanya untuk menyelamatkan sekitar 100 orang dari Hong Kong dan Taiwan. Tidak ada kasus Cina mengirim pejabat untuk memobilisasi warga Cina agar melakukan evakuasi dari pintu ke pintu. Beberapa orang berspekulasi bahwa hal ini dilakukan untuk menutupi sikap pemerintah Tiongkok yang memalukan dan tanggapan acuh tak acuh ketika terjadi insiden anti-Tiongkok, sehingga mereka mengarang berbagai rumor bahwa "warga Tiongkok di luar negeri telah mengisolasi diri dari Tiongkok."[86]

Hong Kong

Para pengunjuk rasa menggunakan cat hitam untuk mengotori gerbang Konsulat Jenderal Indonesia di Leighton Road di Causeway Bay untuk melampiaskan kemarahan mereka. Ketua umum Partai Demokrat Martin Lee menulis sebuah surat kepada Presiden B. J. Habibie yang berisi bahwa apa yang terjadi di Indonesia selama dua hari kerusuhan tersebut telah membangkitkan persamaan dengan serangan rezim Jerman Nazi terhadap Yahudi.[87][79]

Taiwan

Dibandingkan Tiongkok yang mengambil langkah pasif, Taiwan mengambil langkah yang lebih aktif untuk mengecam Indonesia selama peristiwa tersebut. Wu Yuanyan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Tiongkok, mengatakan pada 14 Mei bahwa tidak ada berita mengenai korban di kalangan pengusaha dan turis Tiongkok, dan belum saatnya untuk melaksanakan evakuasi.[88] Perwakilan Republik Tiongkok di Indonesia, Lu Baosun, juga menegaskan bahwa kerusuhan yang terjadi beberapa hari terakhir ini tidak secara khusus menyasar pengusaha Taiwan atau warga negara Tiongkok Indonesia. Saat ini, hanya lima atau enam perusahaan Taiwan yang terkena dampak dan tidak ada yang terluka. Oleh karena itu, tidak ada rencana untuk mengevakuasi warga negara Taiwan.[89] Perdana Menteri Taiwan Vincent Siew kemudian mengadakan pertemuan darurat dengan Kementerian Luar Negeri dan Komisi Urusan Tionghoa Perantauan secara segera mungkin untuk mengambil langkah cepat untuk melindungi warga Tionghoa perantauan dan memastikan bahwa nyawa dan harta benda warga Tionghoa perantauan lokal dan pengusaha Taiwan terlindungi.[90]

Pada 16 Mei, pemerintah Taiwan memberangkatkan pesawat khusus untuk mengevakuasi rakyatnya dan juga para korban, mengirimkan lima pesawat angkut C-130 Hercules untuk bersiaga di Indonesia, serta mengirimkan sebuah armada angkatan laut ke Bali juga untuk mengevakuasi warga Taiwan dan Tionghoa Indonesia.[91] Selain itu, EVA Air menambah penerbangan khusus untuk mengevakuasi ribuan pebisnis dan ekspatriat Taiwan, penerbangan pertama lepas landas pada pukul 09.20 pagi tanggal 15 Mei waktu Taipei, membawa 238 penumpang. Penerbangan khusus China Airlines kedua lepas landas sekitar pukul 10. China Airlines kemudian memberangkatkan penerbangan lembur kedua ke Jakarta pada pukul 4:30 sore. dan penerbangan lembur ketiga pada pukul 02.50 dini hari. EVA Air juga menambah penerbangan ekstra ke Surabaya pada pukul 01.00 dini hari.[92] Pada periode ini, sejumlah pengusaha Taiwan yang hendak dievakuasi merasa tidak puas dengan kenaikan harga yang dilakukan maskapai dan ketidakefisienan operasi evakuasi pemerintah.[93][94][95]

Pada 17 Mei, Menteri Luar Negeri Jason Hu mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia telah memohon agar Taiwan tidak menarik investasi mereka atau mengevakuasi warganya.[96] Pada 29 Juli, pemerintah Taiwan secara terbuka memanggil delegasi diplomatik Indonesia untuk menyampaikan kecaman keras terhadap peristiwa tersebut dan meminta Indonesia untuk memberi bantuan kepada korban.[97] Pemerintah Taiwan juga mengancam akan menarik investasi mereka dari Indonesia yang mencapai US$ 13 milliar pada tahun tersebut dan juga menolak sebanyak 15,000 pekerja migran Indonesia untuk masuk ke Taiwan.[87] Pada 3 Agustus, ratusan pengunjuk rasa di Taiwan melempar telur ke Kantor Perwakilan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia di Taipei untuk memprotes pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa Indonesia yang dilakukan oleh para demonstran Indonesia.[97] Taiwan menjustifikasi bahwa ancaman yang dikeluarkan didasari prinsip untuk melindungi diaspora Tionghoa serta hak asasi manusia. Pada 9 Agustus, Menteri Investasi Hamzah Haz terbang ke Taiwan untuk meminta maaf serta mempromosikan Indonesia sebagai tempat investasi.[87] Saat yang sama, sebuah delegasi Taiwan bertemu dengan Menteri Pertahanan Wiranto dan juga beberapa jajaran kabinet pemerintahan B. J. Habibie.[79]

Amerika Serikat

Saat kerusuhan di Jakarta mulai pada 15 Mei, pemerintah Amerika Serikat memerintahkan evakuasi "tanggungan dan personel yang tidak penting" dari konsulat. Departemen Luar Negeri juga merekomendasikan warga negara AS untuk meninggalkan negara tersebut menggunakan

penerbangan komersial atau penerbangan evakuasi yang diselenggarakan oleh pasukan AS.[98] *USS Belleau Wood* dan Skuadron Helikopter Marinir "Flying Tigers" ditempatkan di wilayah tersebut sebagai bagian dari rencana evakuasi darurat bagi warga negara AS dan personel kedutaan, yang dikenal sebagai Operasi Bevel Incline.[99] Saat yang sama, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menunda pembayaran bantuan darurat sebesar $1,4 miliar kepada Indonesia, membatalkan rencana kunjungan delegasi militer senior dari negara tersebut, dan mengevakuasi staf kedutaan yang tidak memiliki kepentingan.[100][101][102]

Dalam Laporan Hak Asasi Manusia tentang Indonesia tahun 1998, pemerintah AS menuduh pemerintahan Suharto melakukan “pelanggaran hak asasi manusia yang serius”.[103] Antara pemilu 1997 dan kerusuhan, mahasiswa dan aktivis hak asasi manusia diculik dan disiksa saat berada dalam tahanan pasukan keamanan. Laporan itu juga menyebutkan bahwa polisi melempari dengan batu dan menembaki wartawan asing yang meliput bentrokan antara mahasiswa dan pasukan keamanan pada 6 Mei. Pemerintah federal kemudian menyetujui 7,000 permintaan suaka warga Tionghoa.[104][105] *The New York Times* menjadi surat kabar Amerika pertama yang melaporkan "kerusuhan anti-Tionghoa" tersebut secara luas ke seluruh dunia.[106] Dimulai pada bulan Juli tahun yang sama, warga Amerika Tionghoa melancarkan protes di seluruh Amerika Serikat. Protes tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 7 dan 8 Agustus, dengan 13 kota besar di seluruh Amerika Serikat mengadakan demonstrasi serentak untuk mengutuk kejahatan massa Indonesia. Hampir 20.000 warga Tiongkok berkumpul di depan kedutaan besar dan konsulat Indonesia di seluruh Amerika Serikat, menuntut segera diakhirinya kekerasan anti-Tiongkok dan hukuman berat bagi para penjahat. Pada pagi hari tanggal 8 Agustus, slogan-slogan kemarahan terdengar di depan Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat di Washington, D.C. Hampir seribu orang Tiongkok berkumpul untuk melakukan protes dan menyerahkan surat protes kepada pejabat AS di Indonesia.[107][108][109][110]

Negara lain

Pada 15 Mei, Singapore Airlines beralih ke pesawat penumpang besar untuk memenuhi permintaan penerbangan dari Jakarta ke Singapura. Pada tanggal 16 Mei, pemerintah Singapura mengirimkan personel ke Bandara Jakarta untuk membantu warga Singapura dalam evakuasi. Hingga 19 Mei, 2.900 warga Singapura telah berhasil dievakuasi.[111][112][113][114]

Pada bulan Juli, warga Bangkok dan Kuala Lumpur mengelar aksi unjuk rasa di depan KBRI Thailand dan Malaysia.[115]

Angkatan Udara Kerajaan Belanda mengirimkan sebuah pesawat tanker McDonnell Douglas DC-10 untuk mengevakuasi ekspatriat lokal, terutama warga Tionghoa yang memegang kewarganegaraan Belanda.[116]

Dampak

Untuk lebih dari seminggu setelah kerusuhan di Jakarta, warga setempat tetap di rumah karena ketakutan atas keselamatan diri sendiri. Kebanyakan bank, perusahaan dan gedung umum ditutup di berbagai kota besar di Indonesia. Beberapa gedung pemerintahan tetap dibuka untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei. Walaupun ada ketakutan bahwa kerusuhan masih akan

berlanjut, hanya ada tiga insiden kecil yang terjadi di kota kecil. Data yang dikumpulkan oleh tim pencari fakta mengenai jumlah korban jiwa akibat kekerasan di ibu kota saling bertentangan. TRUK melaporkan 1.109 korban tewas akibat kebakaran, 27 korban tewas akibat tembakan, 91 korban luka-luka, dan 31 korban hilang. Laporan polisi menyebutkan 463 korban tewas dan 69 korban luka-luka, sementara pemerintah kota hanya melaporkan 288 korban tewas dan 101 korban luka-luka.[117][118] Kerugian properti diperkirakan mencapai Rp2,5 triliun (US$238 juta),[119] dengan laporan pemerintah kota 5.723 bangunan dan 1.948 kendaraan hancur, sementara laporan polisi menghitung 3.862 bangunan dan 2.693 kendaraan.[118] Kerugian di Surakarta diperkirakan mencapai Rp457 miliar (US$46 juta), dengan etnis Tionghoa menderita kerugian materi paling besar.[120]

Dalam budaya populer

Drama dan karya fiksi lainnya banyak ditulis sebagai respons terhadap kerusuhan 1998, khususnya yang berkaitan dengan aspek rasial dan pemerkosaan terhadap perempuan Orang Tionghoa Indonesia. Ini termasuk Putri Cina (Bahasa Inggris: *Chinese Princess*), oleh pendeta Katolik Indonesia dan penulis Sindhunata, yang membahas tentang hilangnya identitas yang dialami oleh Orang Tionghoa Indonesia setelah kerusuhan dan sebagian ditulis dari sudut pandang korban pemerkosaan.

Film dan televisi

- *Di Balik 98* (2015) - Film drama Indonesia berdasarkan peristiwa kerusuhan 1998, dibintangi oleh Chelsea Islan dan Boy William
- *May* (2008) - Film drama Indonesia, bercerita mengenai sepasang kekasih Antares (Yama Carlos) dan May (Jenny Chang) yang berbeda suku, tetapi harus terpisah karena peristiwa kerusuhan 1998
- *9808 Antologi 10 Tahun Reformasi Indonesia* (2008) - Film Dokumenter-Antologi Indonesia, berdasarkan peristiwa kerusuhan 1998
- *Pengepungan di Bukit Duri* (2025) - Film fiksi kerusuhan di Indonesia yang terinspirasi dari peristiwa kerusuhan 1998

Lihat pula

- Tim Gabungan Pencari Fakta
- Ita Martadinata Haryono
- Pemerkosaan massal 1998
- Sinofobia
- Kejatuhan Soeharto
- Insiden 13 Mei, peristiwa serupa di Malaysia
- Kerusuhan rasial Singapura 1969, peristiwa serupa di Singapura

Referensi

1. Purdey 2006, hlm. 141.

2. Jumaidi, Susanto (2023-05-13). "Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 di Palembang: Kronologi dan Dampak". *kompas.id*. Diakses tanggal 2026-07-20.
3. Jumaidi, Susanto (2023-05-13). "Kerusuhan Mei 1998 di Surabaya: Kronologi dan Dampaknya". *kompas.id*. Diakses tanggal 2026-07-20.
4. van Klinken, Gerry (25 September 1999). "Inside Indonesia - Digest 86 - Towards a mapping of 'at risk' groups in Indonesia". Diarsipkan dari asli tanggal 2000-09-20. Diakses tanggal 17 Juni 2015.
5. van Klinken, Gerry (29 Mei 1998). "The May Riot". *[INDONESIA-L] DIGEST*. Diarsipkan dari asli tanggal 2015-07-04. Diakses tanggal 17 Juni 2015.
6. "ASIET NetNews Number 20 - June 1-7, 1998". Diarsipkan dari asli tanggal 2015-02-13. Diakses tanggal 17 Juni 2015.
7. Horowitz, Donald L. (25 Maret 2013). *Constitutional Change and Democracy in Indonesia*. Cambridge University Press. ISBN 9781107355248. Diakses tanggal 17 Juni 2015.
8. Collins 2002 (http://www.ohio.edu/cas/classics/faculty/upload/Indonesia-A-Violent-Culture.pdf) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20150213065127/http://www.ohio.edu/cas/classics/faculty/upload/Indonesia-A-Violent-Culture.pdf) 13 Februari 2015 di Wayback Machine, p. 597.
9. Chinoy, Mike (16 Mei 1998). "CNN - Hundreds dead from Indonesian unrest". *CNN*. Diakses tanggal 17 Juni 2015.
10. Friend, Theodore (2003). *Indonesian Destines*. Belknap Press of Harvard University Press. hlm. 532. ISBN 0-674-01834-6.
11. Hannigan, Tim (2015). *A Brief History of Indonesia*. Tuttle Publishing. ISBN 978-0804844765.
12. Osman, Nurfika; Haryanto, Ulma (14 Mei 2010). "Still No Answers, or Peace, for Many Rape Victims". *Jakarta Globe*. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-09-04.
13. "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2009-07-20. Diakses tanggal 2009-06-26.
14. Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Tanggal 13-15 Mei 1998 (http://semanggipeduli.com/tgpf/laporan.html) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20060630125445/http://semanggipeduli.com/tgpf/laporan.html) 2006-06-30 di Wayback Machine, *Situs SemanggiPeduli.com*, 23 Oktober 1998. Diakses pada 15 Mei 2010.
15. "Berapa Korban Kerusuhan Mei 1998?". *Kompas.com*. Diakses tanggal 3 Agustus 2024.
16. Lengser keprabon (https://books.google.co.id/books?id=xHxwAAAAMAAJ&q=plaza+sentral+Klender&dq=plaza+sentral+Klender&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwjvwKrB7K2AAxUqSGwGHVB_CToQ6AF6BAgHEAI)
17. Plaza Yogya Klender, Situs Ingatan Tragedi Mei 1998 (https://dinaskebudayaan.jakarta.go.id/encyclopedia/blog/2018/04/Plaza-Yogya-Klender-Situs-Ingatan-Tragedi-Mei-1998)
18. Ester Indahyani Jusuf, dkk. KERUSUHAN MEI 1998 – FAKTA, DATA&Analisis. 2005. Jakarta. Kerjasama Solidaritas Nusa Bangda, APHI, dan TIFA.
19. Femi Adi Soempeno& AA Kunto A. PERANG PANGLIMA – SIAPA MENGKHIANATI SIAPA?. 2009. GALANG PRESS, Yogyakarta.
20. "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2021-02-27. Diakses tanggal 2009-06-26.
21. Meicky Shoreamanis Panggabean. 2008. KEBERANIAN BERNAMA MUNIR-Mengenal Sisi-Sisi Personal Munir. Bandung: Mizan
22. Komnas HAM Pertanyakan Kasus Mei 1998 (http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/03/01/brk,20040301-26,id.html) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20050509121846/http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/03/01/brk,20040301-26,id.html) 2005-05-09 di Wayback Machine. *Tempo Interaktif*, 1 Maret 2004. Diakses pada 15 Mei 2010.
23. Tempo Interaktif (http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/05/12/brk,20100512-247462,id.html) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20100706223821/http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/05/12/brk,20100512-247462,id.html) 2010-07-06 di Wayback Machine, Perempuan Korban Mei 1998 Butuh Amandeman KUHP
24. Purdey 2006, hlm. 120.

25. Purdey 2006, hlm. 121.
26. Jusuf & Simanjorang 2005, hlm. 46–48.
27. Jusuf & Simanjorang 2005, hlm. 29.
28. Purdey 2006, hlm. 130.
29. Purdey 2006, hlm. 110.
30. Human Rights Watch (8 September 1998). "New Report Says Official Denials of Indonesian Rapes Hinder Investigation Print". *Human Rights Watch*. Diakses tanggal 28 Maret 2018.
31. Purdey 2006, hlm. 117.
32. Himawan, E. M., Pohlman, A., & Louis, W. (2022). Revisiting the May 1998 Riots in Indonesia: Civilians and Their Untold Memories. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 41(2), 240-257. https://doi.org/10.1177/18681034221084320
33. Purdey 2006, hlm. 118.
34. Purdey 2006, hlm. 121–122.
35. Purdey 2006, hlm. 124.
36. Purdey 2006, hlm. 129.
37. Purdey 2006, hlm. 138–139.
38. Ong 2005, hlm. 394.
39. Ong 2005, hlm. 393.
40. Purdey 2006, hlm. 164.
41. "〈中國與印尼關係大事記〉". 中國網. 2013年9月29日. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2013-10-14. Diakses tanggal 2013年10月9日. {{cite news}}: Periksa nilai tanggal dalam: |access-date= and |date=
42. 皮传荣 (2017年11月). *新闻写作实务*. 北京: 中國傳媒大學出版社. hlm. 164–166. ISBN 978-7-5657-2035-2. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2023-05-03. Diakses tanggal 2023-04-30 {{cite book}}: Periksa nilai tanggal dalam: |date=引用"〈印尼總統表示將繼續推進與中國的友好關係〉". 《新華社》. 1998-04-18以及"〈中國提供4億美元幫助印尼克服金融危機〉". *《中國日報》（香港版）*. 1998-04-19. "綜合外電雅加達18日消息 中國外長唐家璇昨天在此間說，中國已承諾通過國際貨幣組織向印度尼西亞提供4億美元以幫助印尼克服經濟危機。唐家璇在會見印尼總統蘇哈托後對記者說，「我們已同意通過國際貨幣組織向印尼提供4億美元。」上星期天，中國還宣佈了一系列有關援助印尼的協議，其中包括2億美元的貿易出口信貸和3百萬美元的藥品援助。唐家璇於星期天抵達雅加達，將對印尼作3天的工作訪問。他說，「有關貿易將以雙方的需要爲基礎進行安排。」他說，印尼表示他有興趣向中國出口橡膠、椰子油和木材。「中國需要這些貨物。我們將向印尼提供蔗糖、白糖、藥品、醫療器材以及玉米、大米等穀物。」唐還說，中國已經承諾向受到金融危機影響的亞洲國家提供40億美元的援助來幫助它們。「儘管數量不大，但這是一種真誠的援助，不附帶任何條件，」他說。"
43. Jurgen Haacke (13 Mei 2013). ASEAN's Diplomatic and Security Culture: Origins, Development and Prospects. Routledge. hlm. 132–133. ISBN 978-1-136-13146-2. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2013-10-27. Diakses tanggal 2013-10-09.**(Inggris)**
44. Michael Richardson (1998-04-17). "*Japan's Lack of Leadership Pushes ASEAN Toward Cooperation With China*". *《國際先驅論壇報》*. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2014-08-08. Diakses tanggal 2014-06-01. "Mr. Tang also gave an assurance in Jakarta that Beijing regarded recent riots that targeted Indonesia's ethnic Chinese minority as an internal matter for Indonesia to handle. "We always regard ethnic Chinese in Indonesia as Indonesian nationals and the issue relating to the ethnic Chinese as an internal affair of Indonesia," he said."**(Inggris)**

45. Jürgen Haacke (28 Februari 2010). Cooperative Security in the Asia-Pacific: The ASEAN Regional Forum. Routledge. ISBN 978-0-415-46052-1. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2013-12-31. Diakses tanggal 2013-10-21.
46. Jurgen Haacke (13 Mei 2013). ASEAN's Diplomatic and Security Culture: Origins, Development and Prospects. Routledge. hlm. 132–133. ISBN 978-1-136-13146-2. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2013-10-27. Diakses tanggal 2013-10-09.(Inggris)
47. Riordan Roett; Guadalupe Paz (2008年). China's Expansion Into the Western Hemisphere: Implications for Latin America and the United States. Brookings Institution Press. hlm. 209. ISBN 0-8157-7554-7. {{cite book}}: Periksa nilai tanggal dalam: |date=(Inggris)
48. Daojiong Zha (查道炯) (2000). " "China and the May 1998 riots of Indonesia: exploring the issues" " (PDF). *The Pacific Review* (Vol. 13 No. 4): 557-575. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2019-05-13. Diakses tanggal 2019-05-13. "Third, prior to the outbreak of the May riots, Beijing's policy reportedly 'was simply to hope the riots wouldn't happen'. (The quotation is attributed to Zhang Yunling, Director of the Institute of Southeast Asian Studies, the Chinese Academy of Social Sciences.)" {{cite journal}}: |issue= memiliki teks tambahan
49. James Jiann Hua To (杜建華) (2009). Hand-in-Hand, Heart-to-Heart- Qiaowu and the Overseas Chinese. University of Canterbury. hlm. 217–224. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2019-05-13. Diakses tanggal 2019-05-13. "Beijing publicly declared that the violence in Indonesia was a domestic issue and would not intervene. China maintained that governments should treat ethnic Chinese of foreign nationality as citizens of their domicile – any action that would suggest otherwise might provoke suspicions of interference in the region."
50. Leo Suryadinata (廖建裕) (2009). Saw Swee-Hock, Sheng Lijun, Chin Kin Wah (ed.). *"ASEAN-China Relations Realities and Prospects"*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. hlm. 356-366. ISBN 981-230-342-1. "Indeed, unlike the riots in the 1960s, the May 1998 riots were not anti-PRC. It was targeted at the ethnic Chinese and there was no indication that it developed into anti-PRC riots. Although some PRC citizens might have been affected by the riots, the majority happened to be Indonesian citizens. However, under pressure from world opinion, especially from the ethnic Chinese communities outside China, Beijing appeared to change its attitude towards the matter. Nevertheless, the main policy of non-intervention remained." {{cite book}}: |work= diabaikan
51. 張潔 (2005年). "〈冷戰後印尼對華政策的演變〉". *《當代亞太》* (第3期). 中國社會科學院亞太研究所. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-10-29. Diakses tanggal 2013-10-28. "對於中國大陆政府來說，一方面強調不干涉他國內政，另一方面仍然十分關心海外華人華侨的安危。1998年5月印尼發生排華騷亂，中國大陆政府多次提出外交交涉並通過其他方式表示關切，要求印尼政府徹底查處有關事件，採取有效措施保護華人正當權益。" {{cite journal}}: Periksa nilai tanggal dalam: |date=
52. "〈和平共处五项原则〉". 新华网. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2014-07-08. Diakses tanggal 2014-04-26.
53. "〈第八章·领事保护工作·第五节·1998年以来重大领事保护案件的处理情况〉". *《中国领事工作》*. Vol. 上册. 世界知识出版社. 2014年. ISBN 9787501246083. "1998年5月，印度尼西亚首都雅加达发生骚乱，当地中国公民人身和财产安全受到严重威胁。中国外交部及时成立24小时值班应急小组，周密制订护侨撤侨方案。在中央的统一指挥下，中国驻印尼使馆官员冒着生命危险，将包括港澳台同胞在内的大批中国公民转移至安全地带或协助其撤离印尼。" {{cite book}}: Periksa nilai tanggal dalam: |year=
54. "〈中国政府密切关注印尼中国侨民境遇〉". *《人民日报》*. 1998-05-22. hlm. 第1版.
55. "〈正義和良知的呼喚〉". *People's Daily*. 1998-08-15. hlm. 3.

56. 莫知名 (1998-08-07). "〈印尼耶加達暴亂實錄〉" (dalam bahasa Tionghoa). 《时代论坛》. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2019-10-02. Diakses tanggal 2019-10-02. "最少有三個為父為丈夫的到中國大使館求助，館中人員先問：你是甚麼國籍？答道WNI，馬上一口拒絕。當大亂時，澳洲、日本、美國、馬來西亞、新加坡，甚至遠至法國都派飛機撤僑，或者表達關注。可是中國政府一聲不響，怎不令我們這些「海外孤兒」心碎！"
57. Leo Suryadinata (廖建裕) (2017). " "Non-Intervention: The 1998 Anti-Chinese Violence in Indonesia" ". The Rise of China and the Chinese Overseas: A Study of Beijing's Changing Policy in Southeast Asia and Beyond. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute. hlm. 53–68. ISBN 9789814762656. "Even before the May 1998 violence, many Chinese outside Indonesia criticized the PRC government, some even suggesting that Beijing should protect the Chinese there. However, Beijing had refused to intervene. Beijing–Jakarta ties had been quite cordial before the May riots and Beijing had no desire to jeopardize the relationship.... Privately, a Chinese diplomat in the United States noted that Beijing would not be able to protest or send ships to Indonesia because "there is no good reason to do so as the majority of the Chinese in Indonesia are Indonesian citizens."... Understandably, the embassy was cautious in doing so as this too might affect Sino–Indonesian relations. When serious anti-Chinese riots took place in Jakarta, Surakarta, and other areas between 13 May and 15 May 1998, Beijing's attitude remained unchanged."
58. Daojiong Zha (查道炯) (2000). " "China and the May 1998 riots of Indonesia: exploring the issues" " (PDF). *The Pacific Review* (Vol. 13 No. 4): 557–575. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2019-05-13. Diakses tanggal 2019-05-13. "China did take measures to evacuate its citizens (including Hong Kong passport holders) working and travelling in Indonesia and offered consular protection to Taiwan and Macao travel document holders who would seek assistance from its diplomatic missions in Indonesia. The obvious distinction here is that China did not appear willing to get involved with the fate of the Indonesian Chinese." {{cite journal}}: |issue= memiliki teks tambahan
59. James Jiann Hua To (杜建華) (2009). Hand-in-Hand, Heart-to-Heart- Qiaowu and the Overseas Chinese. University of Canterbury. hlm. 217–224. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2019-05-13. Diakses tanggal 2019-05-13. "Publicly and officially, Jakarta's domestic affairs were not the concern of Beijing. Beijing referred to ethnic Chinese as "members of the Indonesian family," whom it had no obligation to protect."
60. Shee Poon Kim (徐本欽) (2000). China's responses to the May 1998 anti-Chinese riots in Indonesia. Singapore: East Asian Institute, National University of Singapore. ISBN 981-04-2483-3. "The timing of the anti-Chinese riots came at a sensitive period for the Chinese leadership, who feared that nationalistic feelings among the Chinese students in Beijing would be stirred up, putting pressure on the Jiang Zemin leadership, particularly since the state of the May anti-Chinese riots could rekindle the memory of the 4 June 1989 Tiananmen massacre."
61. James Jiann Hua To (杜建華) (2009). Hand-in-Hand, Heart-to-Heart- Qiaowu and the Overseas Chinese. University of Canterbury. hlm. 217–224. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2019-05-13. Diakses tanggal 2019-05-13. "In May 1998, 1200 OC were killed, dozens of OC women raped, and properties torched as the Suharto regime ended. Beijing was slow to react, and by making only a brief mention in the state controlled media, it did not have to address it as a matter of foreign policy. Those who tried to protest were rendered silent, and any news coverage quickly suppressed."

62. 冯媛 (2007) [1998年]. "〈叙述强暴：突出与遮蔽——媒介如何再现印尼五月骚乱中华人妇女被强暴事件〉". *《睡美人如何醒来》*. 北京: 九州出版社. hlm. 205–225. ISBN 978-7-80195-701-6. "〈二、滞後和視角——大陸傳媒的報道和切入點〉大陸傳媒對強暴事件的反應總體上是相當滯後的。6月上旬強暴事件被披露出來後，許多國家和地區的新聞媒介都有快速反應，一些國際組織和政界人士也表示了關注和譴責。到7月14日，中國外交部在例行記者會上首次如此表態："中方對于印尼華人在騷亂中遭受到的遭遇表示關注和同情。作爲印尼的友好鄰邦，中國政府希望印尼政府采取有效措施，使得包括華人在內的印尼各族人民能夠安居樂業，繼續爲印尼的社會發展和經濟繁榮做出貢獻。"這個消息《人民日報》和其他國內媒介沒有報道。直到7月29日，《人民日報》終于在第4版刊登《外交部發言人答記者問，中國政府對印尼華人婦女在5月印尼騷亂中遭強暴表示強烈關注和不安》。同日第6版，還發表了《唐家璇會見印尼外交部長》，談到"今年5月發生的不幸事件已引起國際社會的關注，中方對此也是很重視的"，但是並沒有直接提到強暴事件。《人民日報》報道後，大陸傳媒對強暴事件的反應才正式開禁。"

63. "〈印尼暴民排华事件的启示和省思〉". 馬來西亞《星洲日报》. 1998-07-05. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2019-08-12. Diakses tanggal 2021-06-18. "印尼的暴民排华事件让当地华人受尽苦难，外表看来是一个国家的内政行为，是清官难审的家务事。有的国家以无权过问为由，对一连串惨剧始终噤若寒蝉。然而纵使外交辞令是如何法理兼顾，无懈可击，却显然有悖人情，而且无法掩盖历史的真相，也推卸不了他们对人道主义的承诺和责任。印尼华人的不幸遭遇，实际上是一个民族势衰下的历史悲剧的延续，今天散居在海外的华人就犹如出嫁到远方的女儿，她们当日含泪挥别故乡，在惊悸与不安中踏上异国的土地，那时她们在不由自主之下，对生命与幸福下的一种赌注。今天，眼看着出嫁的女儿因被抢夺和欺凌而伸出她们无助的双手时，作为一个有长远文化渊源并自称维护正义的"娘家"，难道可以在这个时候漠然关上家门吗？我们不能只期待女儿的孝敬和回报，却忘了该对她们付出真诚的关心和祝福。"

64. "*CHINA: Beijing Breaks Silence on Racist Attacks in Indonesia*". 国际新闻社. 1998年8月19日. Diarsipkan dari asli tanggal 2014-04-14. "Two months later, Beijing seems to have abandoned its public policy of 'non-interference' in the affairs of other countries." {{cite news}}: Periksa nilai tanggal dalam: |date=

65. Leo Suryadinata (廖建裕) (2009). Saw Swee-Hock, Sheng Lijun, Chin Kin Wah (ed.). ASEAN-China Relations Realities and Prospects. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. hlm. 356-366. ISBN 981-230-342-1. "The first official reaction of Beijing to the May 1998 riots occurred in late July 1998. However, the first reaction by a PRC official to the incident was on 6 July. Chen Shiqiu, the new Chinese ambassador to Indonesia, visited East Kalimantan to investigate the possibility of investing in the area, especially in the palm oil business. During his visit, he was asked by Indonesia reporters on his view of the May riots." {{cite book}}: |work= diabaikan

66. Leo Suryadinata (廖建裕) (2009). Saw Swee-Hock, Sheng Lijun, Chin Kin Wah (ed.). ASEAN-China Relations Realities and Prospects. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. hlm. 356-366. ISBN 981-230-342-1. "He was quoted as saying that China was "concerned with the incident" and wanted the Indonesian Government "to investigate the matter thoroughly". He told the reporters that he met B.J. Habibie twice: the first time when Habibie as still vice-president and the second time, when Habibie was president. During the meeting Chen said that he discussed the riots and "hoped that the riots will not recur." Chen clearly stated that, "according to the international law as well as the law of the two countries, it was the responsibility of the Indonesian Government to protect its own citizens, including the citizens of Chinese descent. " There was no official protest on the part of Bejing." {{cite book}}: |work= diabaikan

67. "〈外交部發言人唐國強答記者問〉". *《大公報》*. 香港. 1997-07-30. "北京28日消息：中國外交部發言人唐國強今天在回答記者提問時表示，中國政府對印尼華人婦女在今年五月印尼騷亂中遭強暴表示強烈關注和不安。有記者問：最近，香港同胞及海外華人對印尼華人婦女在五月騷亂中遭強暴紛紛以不同形式表示義憤，請問中國政府對此有何評論？唐國強答：對印尼騷亂中印尼華人婦女遭強暴和印尼華僑、華人所受遭遇，中國政府一直表示強烈關注和不安。我們多次通過外交途徑希望印尼政府徹底查處有關事件，並採取有效措施，避免類似不幸事件的發生。唐國強說：長期以來，旅居印尼的華僑、華人通過自己的辛勤勞動爲印尼經濟和社會發展作出了重要貢獻。他們的人身安全和合法權益應該得到印尼政府的有效保護，使他們能夠同印尼各族人民一道安居樂業。妥善和公正地處理印尼華人、華僑問題，也有利於印尼自身的穩定和發展。"
68. 人民日報評論員 (1998年8月3日). "〈印尼華人的合法權益應得到保護〉". 《人民日報》. {{cite news}}: Periksa nilai tanggal dalam: |date=
69. "〈中国政府态度冷漠 北大学生准备抗议〉". *《联合早报》* (dalam bahasa Tionghoa (Singapura)). 新加坡. 1998-08-13. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2023-05-14. Diakses tanggal 2023-05-14.
70. "〈北京大学生示威申请遭拒〉". *《联合早报》* (dalam bahasa Tionghoa (Singapura)). 新加坡. 1998-08-17. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2023-05-14. Diakses tanggal 2023-05-14.
71. "〈中國民運 - 1998年8月份新聞摘要〉". 香港市民支援愛國民主運動聯合會. 1998年8月31日. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-10-12. Diakses tanggal 2013年10月9日. {{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam: |access-date= and |date=
72. Teresa Poole (1998-08-18). "*Peking students take to the streets*". *Independent*. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2019-05-09. Diakses tanggal 2019-05-08.
73. "Chronology for Chinese in Indonesia". Minorities at Risk Project. 2004. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2013-10-12. Diakses tanggal 2013-10-12.**(Inggris)**
74. Daojiong Zha (查道炯) (2000). " "China and the May 1998 riots of Indonesia: exploring the issues" " (PDF). *The Pacific Review* (Vol. 13 No. 4): 557–575. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2019-05-13. Diakses tanggal 2019-05-13. "Beginning in August through November, China made a series of public pronouncements to express its displeasure with the Indonesian government over the latter's handling of the May riots. Also in August, China agreed to sell 50,000 tons of rice to Indonesia and provided Indonesia with a $3 million grant of medicines and pharmaceuticals. It also went ahead to execute a $200 million economic loan package – agreed in April 1998 – to Indonesia. In November, a Chinese trade delegation visited Jakarta, on schedule, to discuss Chinese investment projects in Indonesia." {{cite journal}}: |issue= memiliki teks tambahan
75. " "Aid: RI negotiating rice from IDB" ". *Antara*. 1998-08-06.
76. " "China grants US$3 million in medical aid" ". *Antara*. 1998-08-15.
77. " "China, RI sign barter deal to boost two-way trade" ". *The Jakarta Post*. 1998-11-26.

78. 徐寶康 (1998-11-18). "〈江澤民會見印尼總統哈比比（附圖片）〉". *《人民日報》*. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2019-05-11. "本報吉隆坡11月17日電 記者 徐寶康報道：國家主席江澤民今天上午在下榻的香格里拉飯店會見了正在吉隆坡出席亞太經合組織第六次領導人非正式會議的印度尼西亞總統哈比比。江主席再次祝賀哈比比就任總統，並對他重視並積極推動中國和印尼關係發展表示讚賞。江主席說，印尼是中國的友好近鄰，進一步發展兩國關係是中國政府的既定政策。儘管印尼國內形勢今年發生很大變化，但中國政府致力於鞏固和加強中國和印尼睦鄰友好合作關係的決心沒有變化。中國和印尼之間不存在根本的利害衝突，致力於本國的經濟建設，努力維護本地區的繁榮和穩定是我們的共同目標。哈比比感謝中國在自身也遇到各種困難的情況下仍向印尼提供了珍貴的援助。他說，患難之交才體現出真正的友誼，印尼希望進一步加強同中國的友好合作關係。在談到今年5月印尼騷亂中發生的不幸事件時，江主席說，印尼華人加入印尼國籍後，已經成爲印尼民族大家庭中的一員。作爲印尼公民，其人身安全和合法權益理應受到印尼政府的有效保護，他們應像普通印尼公民一樣享受同樣的待遇和權利。他說，我們注意到閣下本人和印尼政府多次表示要保障華人的合法權益，並且已經開始採取一些具體的措施。中國在華人、華僑問題上沒有任何私利，相信總統閣下和印尼政府能夠理解中國人民的感受和關注。我們認爲，妥善處理好華人問題不僅有利於印尼的長治久安，也有利於我們兩大鄰國之間友好合作關係的順利發展。哈比比說，印尼華人都是印尼人，是多民族的印尼大家庭中的一員。印尼政府認爲，5月發生的事件是一種犯罪行爲，決不能容忍這樣的事情再次發生。印尼將根據法律進行嚴肅處理。"
79. Purdey 2006, hlm. 165.
80. " "Jiang: China will never use overseas Chinese to seek gain." ". *Xinhua English Newswire*. 1998-11-18.
81. Daojiong Zha (查道炯) (2000). " "China and the May 1998 riots of Indonesia: exploring the issues" " (PDF). *The Pacific Review* (Vol. 13 No. 4): 557–575. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2019-05-13. Diakses tanggal 2019-05-13. "In November China's diplomatic action culminated when President Jiang Zemin raised the suffering of the Indonesian Chinese in the May riots with Indonesian President B. J. Habibie at the China–ASEAN dialogue meeting in Kuala Lumpur. Jiang further made a point by speaking to a group of Indonesian business leaders and repeated the pledge that China would "never try to use people of Chinese origin living in Indonesia to seek political or economic gain there". Thereafter, the issue of the May riots disappeared from China's news media." {{cite journal}}: |issue= memiliki teks tambahan
82. "正義和良知的呼喚". *People's Daily*. 1998-08-15. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-10-12. Diakses tanggal 28 Oktober 2017.
83. Suryadinata 2004, hlm. 92.
84. 周小平 (2014-09-19). "〈国人海外生存实录〉". *《黨建網》* (dalam bahasa Tionghoa). Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2024-06-20. Diakses tanggal 2024-06-20.
85. 刘永固 (2010). "〈终生难忘的一周——雅加达五月骚乱的日日夜夜〉". Dalam 张兵、梁宝山 (ed.). *《紧急护桥—中国外交官领事保护纪实》*. 新华出版社. hlm. 76–91. ISBN 9787501191819.
86. 北風 (2024-06-20). "〈如何看待历史上印尼两次大规模屠华事件？〉". *《知乎》* (dalam bahasa Tionghoa). Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2024-06-21. Diakses tanggal 2024-06-20.
87. Jemma Purdey (2006). *Anti-Chinese Violence in Indonesia: 1996 - 99*. University of Hawaii Press. ISBN 978-0-8248-3057-1. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2013-10-13. Diakses tanggal 2013-10-08.
88. "〈外交部：不到撤僑時刻〉". *《中時晚報》*. 1998-05-14. Diarsipkan dari asli tanggal 2003-08-15.
89. "〈陸寶蓀：僅五、六家台商被波及〉". *《中國時報》*. 臺灣. 1998-05-15. Diarsipkan dari asli tanggal 2003-10-04.

90. "〈蕭萬長指示僅速應變保僑〉". *《中國時報》*. 臺灣. 1998-05-15. Diarsipkan dari asli tanggal 2003-08-18.
91. "〈5架C130軍機、艦隊待命馳援〉". 臺灣: 《中時晚報》. 1998-05-16. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-03-27.
92. "〈運僑專機抵國門〉". 臺灣: 《中時晚報》. 1998-05-16. Diarsipkan dari asli tanggal 2003-10-04.
93. "〈撤僑哄抬票價? 華航、長榮否認〉". 臺灣: 《中時晚報》. 1998-05-16. Diarsipkan dari asli tanggal 2003-10-04.
94. "〈雅加達苦等撤僑班機　台商自嘲是孤兒〉". 臺灣: 《中時晚報》. 1998-05-16. Diarsipkan dari asli tanggal 2003-10-04.
95. "〈印尼歸僑痛批政府效率〉". *《中國時報》*. 臺灣. 1998-05-16. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-10-06. Diakses tanggal 2013-07-17.
96. "〈胡志強：印尼表達希望我勿撤資撤僑〉". *《中國時報》*. 臺灣. 1998-05-17. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-10-12. Diakses tanggal 2013-10-10.
97. "Chronology for Chinese in Indonesia". Minorities at Risk Project. 2004. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2013-10-12. Diakses tanggal 2013-10-12.**(Inggris)**
98. "As Strife Grips Indonesia, U.S. Asks Citizens to Leave and Delays Aid Payment". *The New York Times* (dalam bahasa Inggris). 1998-05-15. Diakses tanggal 2023-04-30.
99. Pike, John (27 April 2005). "Operation Bevel Incline". GlobalSecurity.org. Diakses tanggal 8 Juni 2011.
100. Landler, Mark (1998-05-16). "UNREST IN INDONESIA: THE CHINESE; The Target Of Violence In a Time Of Wrath". 《紐約時報》. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2019-07-02. Diakses tanggal 2020-09-19.
101. "〈逾萬美軍赴泰演習必要時協助撤僑〉". 臺灣: 《中時晚報》. 1998-05-17. Diarsipkan dari asli tanggal 2003-10-04.
102. "〈美國施壓　籲蘇哈托下台〉". *《中國時報》*. 臺灣. 1998-05-21. Diarsipkan dari asli tanggal 2008-11-21.
103. U.S. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. "Indonesia Country Report on Human Rights Practices for 1998". Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2023-04-04. Diakses tanggal 2023-04-30.
104. Damai Sukmana (2009-01-11). "Game of chance". *Inside Indonesia*. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2023-05-12. Diakses tanggal 2023-05-12.
105. Ethan Harfenist (2018-05-24). "Chinese-Indonesian Refugees Found a New Home, and New Problems, in the US". *Vice*. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2023-05-12. Diakses tanggal 2023-05-12.
106. Landler, Mark (1998-05-15). "UNREST IN INDONESIA: THE OVERVIEW; Indonesian Capital Engulfed by Rioting". The New York Times. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2020-05-28. Diakses tanggal 2020-09-19.
107. "〈全美华人抗议印尼种族清洗〉". *《联合晚报》* (dalam bahasa Tionghoa (Singapura)). 新加坡. 1998-07-29. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2023-05-14. Diakses tanggal 2023-05-14.
108. "〈旧金山千余人集会抗议印尼排华暴行〉". *《联合早报》* (dalam bahasa Tionghoa (Singapura)). 新加坡. 1998-08-04. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2023-05-14. Diakses tanggal 2023-05-14.
109. "〈美国华人抗议印尼排华〉". *《联合早报》* (dalam bahasa Tionghoa (Singapura)). 新加坡. 1998-08-08. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2023-05-14. Diakses tanggal 2023-05-14.
110. "〈纽约华人抗议印尼虐华暴行〉". *《联合早报》* (dalam bahasa Tionghoa (Singapura)). 新加坡. 1998-08-09. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2023-05-14. Diakses tanggal 2023-05-14.

111. "〈改用大型客機滿足乘客要求 從雅加達飛回我國新航班機全部爆滿〉". *《联合早报》*. 新加坡. 1998-05-15. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2023-05-14. Diakses tanggal 2023-05-14.
112. "〈派人員到雅加達機場設法取得機位 我大使館盡力助國人離印〉". *《联合早报》*. 新加坡. 1998-05-16. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2023-05-14. Diakses tanggal 2023-05-14. {{cite news}}: Kutipan memiliki parameter tidak dikenal yang kosong: |2=
113. "〈许多华裔和外国人包专机来我国避难〉". *《联合早报》*. 新加坡. 1998-05-16. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2023-05-14. Diakses tanggal 2023-05-14.
114. "〈外交部繼續派人在雅加達機場協助 2900新加坡人順利回國〉". *《联合早报》*. 新加坡. 1998-05-19. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2023-05-14. Diakses tanggal 2023-05-14.
115. 徐滇庆 (1998-08-03). "印尼记闻". *《华夏文摘》* (第一五四期). Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2023-05-04. Diakses tanggal 2023-05-01. "自 7 月份以来，在泰国首都曼谷和马来西亚首都吉隆坡等地民众上街游行，抗议印尼反华暴行。"
116. "Evaluatie project KDC-10". *Ministerie van Defensie* (dalam bahasa Belanda). 1999-07-01. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2022-01-24. Diakses tanggal 2014-01-05.
117. Purdey 2006, hlm. 147.
118. Hamid et al. 2005, hlm. 118–121.
119. Setiono 2003, hlm. 1084.
120. Purdey 2006, hlm. 132.

Pranala luar

- **(Indonesia)** Sejarah Reformasi - Semanggi Peduli (http://semanggipeduli.com/Sejarah/frame/kerusuhan.html) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20051125043955/http://semanggipeduli.com/Sejarah/frame/kerusuhan.html) 2005-11-25 di Wayback Machine
- **(Indonesia)** "Komnas HAM Pertanyakan Kasus Mei 1998" (http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/03/01/brk,20040301-26,id.html) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20050509121846/http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/03/01/brk,20040301-26,id.html) 2005-05-09 di Wayback Machine, *Tempo Interaktif*
- **(Indonesia)** Sejarah Reformasi - Harga Yang Harus Dibayar Etnis Tionghoa di Indonesia (http://www.tionghoa.info/kerusuhan-mei-1998-harga-yang-harus-dibayar-oleh-etnis-tionghoa)

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kerusuhan_Mei_1998&oldid=30221811"